



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3880-3886

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Perbandingan Efektivitas SIMDA dan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Christina Patricia Karamu¹, Fajar Sriningsih², Sri Yuni³, M. Ichsan Diarsyad⁴

^{1,3,4}Universitas Palangka Raya

²Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

¹tinapatricia2000@gmail.com, ²aris.tewel@gmail.com, ³sri.yuni@feb.upr.ac.id, ⁴muhammad.ichsan@feb.upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yaitu staf Sub Bagian Keuangan dan Aset serta pegawai Sub Bagian Perencanaan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan SIMDA dalam aspek integrasi sistem, transparansi, akurasi laporan, dan standarisasi pengelolaan keuangan daerah. SIPD memungkinkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara online dan terintegrasi secara nasional sehingga mempermudah proses monitoring dan pengawasan. Namun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti server lambat, error sistem, gangguan jaringan internet, serta proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Di sisi lain, SIMDA dinilai lebih stabil dan mudah digunakan karena telah diterapkan dalam jangka waktu yang lama sehingga pegawai lebih memahami alur kerja sistem tersebut. Akan tetapi, SIMDA memiliki keterbatasan dalam integrasi data karena belum terhubung secara nasional. Dengan demikian, SIPD dinilai lebih efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel, meskipun optimalisasi implementasinya masih memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia.

Kata kunci: SIPD, SIMDA, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip *good governance*. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga berkaitan dengan upaya menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien [1]. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah [2]. Seluruh tahapan tersebut membutuhkan dukungan sistem informasi yang mampu menghasilkan data dan informasi secara cepat, tepat, akurat, serta terintegrasi sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara optimal [3].

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi dan pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah [4]. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Salah satu sistem yang pernah digunakan secara luas oleh pemerintah daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Analisis Perbandingan Efektivitas SIMDA dan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penganggaran, penatausahaan, akuntansi, serta pelaporan keuangan daerah [5]. Kehadiran SIMDA memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis dan terstruktur. Selain itu, SIMDA juga dinilai cukup stabil dan mudah digunakan karena telah diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama oleh berbagai organisasi perangkat daerah di Indonesia. Namun demikian, SIMDA masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam aspek integrasi data antar perangkat daerah dan keterhubungan sistem secara nasional sehingga proses sinkronisasi data masih memerlukan penyesuaian secara manual [6].

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem berbasis elektronik yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu platform nasional [7]. Pengembangan SIPD bertujuan untuk menciptakan keseragaman data pemerintah daerah, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta mempermudah pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah [8]. Selain itu, SIPD memungkinkan data keuangan daerah dapat diakses secara real-time sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Implementasi SIPD menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern dan terintegrasi [9]. Sistem ini diharapkan mampu memperbaiki berbagai kelemahan yang sebelumnya terdapat pada sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk keterbatasan integrasi data, perbedaan format pelaporan, dan keterlambatan penyampaian informasi keuangan. Dengan adanya SIPD, seluruh pemerintah daerah di Indonesia diharapkan memiliki standar pengelolaan data dan pelaporan keuangan yang sama sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas pengambilan kebijakan publik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang telah mengalami perubahan sistem pengelolaan keuangan dari SIMDA ke SIPD. Instansi ini menggunakan SIMDA sejak tahun 2004 dan mulai menerapkan SIPD pada tahun 2023. Perubahan sistem tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap transformasi digital pemerintahan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa proses transisi dari SIMDA ke SIPD belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam implementasinya, SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun administratif. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah server sistem yang lambat dan error ketika diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan proses administrasi keuangan, seperti penyusunan anggaran kas, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu, pegawai juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan tampilan, fitur, dan alur kerja pada SIPD yang berbeda dengan sistem sebelumnya.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, serta efektivitas implementasi sistem dalam mendukung aktivitas organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai perbandingan efektivitas SIMDA dan SIPD agar dapat diketahui kelebihan, kelemahan, serta tantangan implementasi kedua sistem tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis perbandingan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan faktual mengenai penerapan kedua sistem dalam pengelolaan keuangan daerah [10].

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, arsip penggunaan sistem, dan regulasi terkait [11]. Observasi terhadap SIMDA dilakukan secara tidak langsung karena sistem tersebut sudah tidak digunakan lagi, sehingga informasi diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan penelitian [12]. Informan terdiri dari staf Sub Bagian Keuangan dan Aset serta pegawai pada Sub Bagian Perencanaan yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) telah digunakan sejak tahun 2004, sedangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mulai diterapkan pada tahun 2023. Perubahan penggunaan sistem tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis digital. Pergantian sistem dari SIMDA ke SIPD juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar proses administrasi keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstandarisasi.

SIMDA merupakan sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah. Selama penerapannya, SIMDA dinilai cukup membantu dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah karena sistem ini memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pegawai. Selain itu, SIMDA juga dianggap relatif stabil karena telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga pengguna lebih terbiasa dengan alur kerja sistem tersebut. Akan tetapi, SIMDA masih memiliki keterbatasan dalam integrasi data karena sistem belum terhubung secara nasional. Kondisi tersebut menyebabkan proses sinkronisasi data antar perangkat daerah masih dilakukan secara terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Sementara itu, SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pembaruan sistem pengelolaan pemerintahan daerah berbasis elektronik. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan dalam satu sistem nasional yang terhubung secara online. Penerapan SIPD diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel karena seluruh data dapat dipantau secara real-time oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa SIPD memiliki keunggulan dalam aspek integrasi sistem dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Informan menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah menggunakan sistem yang sama sehingga data keuangan dapat terhubung secara nasional. Hal tersebut mempermudah proses koordinasi, pengawasan, serta penyusunan laporan keuangan daerah karena format data dan mekanisme pelaporan menjadi lebih seragam.

Informan A menyampaikan bahwa:

“Kalau SIPD lebih terintegrasi karena semua daerah menggunakan sistem yang sama, tetapi sering terkendala server lambat dan error saat digunakan bersamaan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SIPD dinilai lebih unggul dibandingkan SIMDA dalam aspek integrasi data dan keterhubungan sistem secara nasional. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses penginputan data, penganggaran, dan pelaporan keuangan menjadi lebih terstandarisasi sehingga mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Selain itu, sistem berbasis online memungkinkan data dapat diakses secara real-time sehingga informasi keuangan dapat diperoleh secara lebih cepat dan akurat.

Namun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kendala yang paling sering terjadi adalah server sistem yang lambat, error saat proses login, dan gangguan jaringan internet ketika sistem digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan proses administrasi keuangan daerah, seperti penyusunan anggaran kas, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu, gangguan sistem juga menyebabkan pegawai harus menunggu hingga sistem kembali normal sebelum pekerjaan dapat dilanjutkan.

Selain kendala teknis, penerapan SIPD juga memerlukan proses adaptasi dari para pengguna sistem. Pegawai harus menyesuaikan diri dengan tampilan menu, fitur, dan alur kerja baru yang berbeda dengan SIMDA. Perubahan sistem tersebut menyebabkan sebagian pegawai mengalami kesulitan pada tahap awal implementasi, terutama bagi pegawai yang telah lama menggunakan SIMDA.

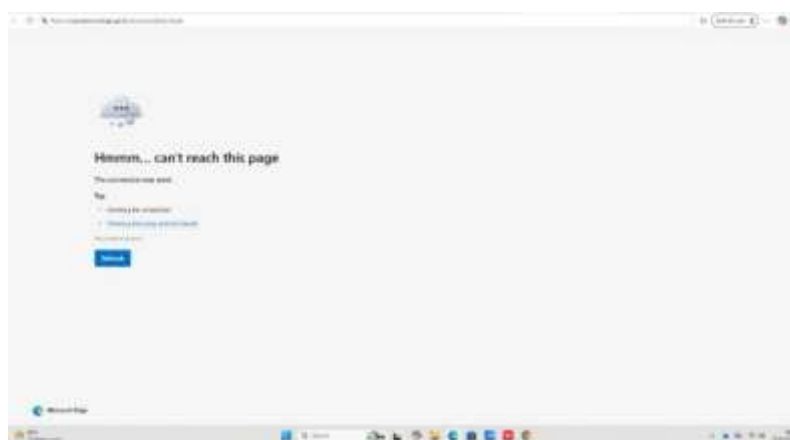
Di sisi lain, SIMDA dinilai memiliki keunggulan dalam aspek stabilitas sistem dan kemudahan penggunaan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pegawai menyatakan bahwa SIMDA lebih mudah dipahami karena telah digunakan dalam waktu yang lama sehingga pengguna lebih memahami mekanisme dan prosedur kerja sistem tersebut. Selain itu, SIMDA juga relatif jarang mengalami gangguan teknis dibandingkan SIPD.

Informan B menyatakan bahwa:

“SIMDA lebih mudah dipahami karena sudah lama digunakan, sedangkan SIPD masih memerlukan penyesuaian.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman penggunaan sistem berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. Pegawai yang telah terbiasa menggunakan SIMDA cenderung lebih cepat dalam melakukan penginputan data dan penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, SIMDA dinilai kurang mampu mendukung kebutuhan integrasi data secara nasional karena sistem masih bersifat terbatas pada lingkup daerah tertentu.

Hasil wawancara yang diperoleh dari informan kemudian diuji menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi terhadap penggunaan SIPD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa sistem masih mengalami kendala berupa server lambat dan error ketika diakses secara bersamaan oleh pengguna. Selain itu, dokumentasi dan arsip pengelolaan keuangan menunjukkan adanya perubahan dan penyesuaian administrasi sejak diterapkannya SIPD. Temuan tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa penerapan SIPD memang memberikan perubahan signifikan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1. Error pada Sistem Login SIPD

Gambar 1 menunjukkan adanya error pada sistem login SIPD ketika sistem digunakan secara bersamaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah karena mempengaruhi kelancaran proses administrasi dan pelayanan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh perbandingan antara SIMDA dan SIPD pada beberapa aspek sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan SIMDA dan SIPD

No	Aspek	SIMDA	SIPD
1	Integrasi Sistem	Belum terintegrasi secara nasional	Terintegrasi secara nasional
2	Transparansi	Masih terbatas	Real-time dan terhubung nasional
3	Stabilitas Sistem	Relatif stabil	Masih sering mengalami error
4	Akurasi Laporan	Baik	Lebih terstandarisasi
5	Kemudahan Penggunaan	Lebih mudah digunakan	Membutuhkan proses adaptasi
6	Penganggaran	Sebagian masih manual	Online dan terintegrasi

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa SIPD memiliki keunggulan dalam aspek integrasi sistem, transparansi, akurasi laporan, dan proses penganggaran yang telah dilakukan secara online dan terintegrasi. SIPD juga dinilai lebih mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah karena seluruh proses administrasi dapat dilakukan dalam satu sistem nasional. Akan tetapi, SIPD masih menghadapi kendala pada aspek stabilitas sistem dan kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru.

Sementara itu, SIMDA masih dinilai unggul dalam aspek kemudahan penggunaan dan stabilitas sistem karena telah lama diterapkan sehingga pengguna lebih memahami alur kerja sistem tersebut. Namun, keterbatasan integrasi data pada SIMDA menyebabkan sistem ini kurang mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang terhubung secara nasional. Oleh karena itu, meskipun SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis, sistem ini dinilai memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam mendukung pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Keunggulan SIPD terutama terlihat pada aspek integrasi sistem, transparansi, standarisasi laporan, dan proses pengelolaan keuangan yang telah dilakukan secara online dan terhubung secara nasional. Meskipun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti server lambat, error sistem, serta kesulitan adaptasi pengguna terhadap sistem baru.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi terintegrasi mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah [13]. Sistem yang terintegrasi memungkinkan proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik [14]. Dalam penelitian ini, SIPD dinilai lebih unggul karena seluruh data pengelolaan keuangan daerah telah terhubung secara nasional dan dapat diakses secara real-time. Kondisi tersebut mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi data antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah [15]. SIPD memberikan kemudahan dalam proses pengawasan karena data keuangan dapat dipantau secara langsung melalui sistem yang

terintegrasi [16]. Selain itu, standarisasi format pelaporan pada SIPD juga membantu mengurangi perbedaan data dan kesalahan administrasi yang sebelumnya masih sering terjadi pada sistem yang belum terintegrasi secara nasional.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi SIPD belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala teknis. Permasalahan berupa server lambat, error sistem, dan gangguan jaringan internet menjadi hambatan yang cukup sering terjadi, terutama ketika sistem digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan proses administrasi keuangan, seperti penginputan data, penyusunan anggaran kas, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur pendukung dan stabilitas sistem yang digunakan [17].

Selain faktor teknis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas penerapan SIPD. Sebagian pegawai masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru karena telah terbiasa menggunakan SIMDA dalam jangka waktu yang lama. Perubahan tampilan sistem, alur kerja, dan mekanisme penginputan data menyebabkan pengguna membutuhkan waktu penyesuaian agar dapat menggunakan SIPD secara optimal. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah [18].

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMDA masih memiliki keunggulan dalam aspek stabilitas sistem dan kemudahan penggunaan. Pegawai menilai SIMDA lebih mudah dipahami karena sistem tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun sehingga pengguna lebih memahami prosedur dan mekanisme kerja sistem. Selain itu, SIMDA relatif lebih stabil dan jarang mengalami gangguan teknis dibandingkan SIPD. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman penggunaan sistem dapat mempengaruhi efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, SIMDA dinilai memiliki keterbatasan dalam aspek integrasi data karena sistem belum terhubung secara nasional. Kondisi tersebut menyebabkan proses sinkronisasi data antar perangkat daerah masih dilakukan secara terbatas dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun SIMDA dinilai lebih mudah digunakan, SIPD tetap dianggap lebih efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa efektivitas suatu sistem informasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, stabilitas sistem, dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Dalam konteks penelitian ini, SIPD memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi optimalisasi implementasinya masih memerlukan perbaikan infrastruktur teknologi serta peningkatan kompetensi pengguna agar sistem dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD dinilai lebih unggul dalam aspek integrasi data, transparansi, akuntabilitas, serta standarisasi pelaporan karena sistem telah terhubung secara nasional dan berbasis online. Selain itu, SIPD mampu mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu platform sehingga mempermudah proses pengawasan dan pengendalian data keuangan daerah. Namun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek teknis dan sumber daya manusia. Kendala yang sering terjadi meliputi server yang lambat, error sistem, gangguan jaringan internet, serta perubahan sistem yang mendadak. Selain itu, proses adaptasi pegawai terhadap sistem baru juga menjadi tantangan karena sebagian pengguna masih lebih familiar dengan SIMDA yang telah digunakan sejak lama. Di sisi lain, SIMDA masih dinilai memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan dan stabilitas sistem. Hal ini disebabkan karena SIMDA telah lama diterapkan sehingga pengguna lebih memahami alur kerja sistem tersebut. Akan tetapi,

SIMDA memiliki keterbatasan dalam integrasi data antar perangkat daerah sehingga kurang mendukung kebutuhan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD lebih efektif dibandingkan SIMDA dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Namun, optimalisasi implementasi SIPD masih memerlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan stabilitas sistem, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar sistem dapat berjalan secara maksimal.

Referensi

- [1] E. Viyurintina dan E. Sisdiyanto, "Good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah: Studi kasus pemerintah daerah Provinsi Lampung," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, vol. 2, no. 4, Apr 2024, doi: 10.62281/v2i4.265.
- [2] N. Nurhayati, "Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia," *JURNAL TRIAS POLITIKA*, vol. 1, no. 2, Okt 2017, doi: 10.33373/jtp.v1i2.1062.
- [3] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- [4] K. Khuluq, S. Kamariyah, dan I. D. Pramudiana, "Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik," *Soetomo Administrasi Publik*, vol. 2, no. 3, hlm. 681–696, Des 2024.
- [5] N. C. Dewi dan S. Mariska, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, vol. 3, no. 1, hlm. 63–70, Jun 2018, doi: 10.15548/al-masraf.v3i1.169.
- [6] R. G. Linggarjati dan S. E. Sinaga, "Efektivitas Perencanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Di Kabupaten Nganjuk," other, IPDN, 2025. Diakses: 14 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://eprints.ipdn.ac.id/21607/>
- [7] P. C. N. Putri dan I. G. A. Purnamawati, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali," *Jurnal Akuntansi Profesi*, vol. 16, no. 02, hlm. 333–340, Jun 2025, doi: 10.23887/jap.v16i02.98105.
- [8] D. A. Putri, T. N. Alifah, dan T. Purwaningrum, "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo," *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, vol. 3, no. 4, hlm. 110–118, 2024.
- [9] P. V. Saragih, J. R. Sipayung, S. T. Sinaga, dan V. A. R. Pasaribu, "Penerapan SIPD dalam Mengelola Efisiensi Administrasi SPM di Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Medan," *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PARHOBAS"*, vol. 1, no. 1, hlm. 28–32, Jan 2026.
- [10] D. Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono*. Bandung: Alfabeta 15, 2018.
- [11] S. Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil*, vol. 27, no. 3, hlm. 283–294, Des 2020, doi: 10.5614/jts.2020.27.3.10.
- [12] I. Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, vol. 6, no. 1, hlm. 33–39, Jun 2021, doi: 10.31764/historis.v6i1.4075.
- [13] M. N. Lotu, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, vol. 10, no. 2, hlm. 79–88, Okt 2022, doi: 10.35508/jak.v10i2.8719.
- [14] Helmi dkk., *Digitalisasi tata kelola pemerintahan gampong dalam mewujudkan percepatan pelayanan dan pembangunan melalui Sistem Informasi Gampong (Sigap)*. CV. Green Publisher Indonesia, 2024.
- [15] T. Imelda, A. Shintia, W. Wati, P. R. Julana, dan M. Mariana, "Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan untuk Efisiensi dan Transparansi," *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, vol. 2, no. 4, hlm. 345–351, Des 2024, doi: 10.59966/ekalaya.v2i4.1466.
- [16] D. A. Firdaus dan C. Anwar, "Pemanfaatan SIPD sebagai Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dalam Perencanaan Anggaran Kecamatan Sidoarjo," *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, vol. 5, no. 1, hlm. 1445–1454, Apr 2026, doi: 10.30640/jumma45.v5i1.6184.
- [17] F. Haiqal, R. Mentari, dan Y. Yulianti, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 5, no. 1, hlm. 3462–3469, Feb 2026, doi: 10.31004/riggs.v5i1.6668.
- [18] R. Inzany, I. Yulivan, G. E. Saputro, S. Suwito, S. A. Purwatoro, dan K. Prihantoro, "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah," *JIP*, vol. 2, no. 10, hlm. 3573–3588, Mar 2022, doi: 10.47492/jip.v2i10.1462.